

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang terdapat di berbagai daerah yang berada di Indonesia. Penyebab kemiskinan terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya sehingga penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan karena sebab-sebab alami (kemiskinan natural), kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural (Latifah, 2011). Kemiskinan yang disebabkan oleh kultur atau budaya yaitu rendahnya etos kerja, ketidakadilan dalam kepemilikan faktor produksi dan model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (Sutrisno, 2007).

Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan, dengan banyaknya kemiskinan yang dialami oleh seseorang baik akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat akan memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Edi Suharto, 2009). Kemiskinan meningkat disetiap tahunnya mengakibatkan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan membuat kebijakan. Kebijakan publik adalah suatu tindakan atau bertindak yang diambil oleh yang memiliki otoritas publik biasanya oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu atau serangkaian masalah (Nugroho, 2009). Munculnya sebuah kebijakan publik diakibatkan oleh adanya sebuah permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Permasalahan pada sektor pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Kemiskinan di Indonesia terdapat dua yaitu kemiskinan di pedesaan dan kemiskinan di perkotaan, permasalahan kemiskinan di perkotaan yakni dalam mengakses pelayanan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, administrasi dan faktor kebijaksanaan (Baker, 2005).

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah dengan pelaksanaan berbagai kebijakan bagi pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat miskin agar maju secara ekonomi, sosial maupun aspek kehidupan yang lain. Berkaca pada permasalahan tersebut maka diperlukan kebijakan yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan diupayakan melalui program-program bantuan yang terangkum dalam konsep percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. Pemerintah membuat kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan serta kebijakan yang inovatif dan solutif juga diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Kepala daerah mampu membuat alternatif positif dan mampu menggerakkan semua elemen masyarakat untuk turut dalam penanggulangan kemiskinan.

Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam salah satu Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Pulau Jawa. Kemiskinan dan

ketimpangan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah DIY. Meningkatnya kemiskinan di DIY membuat pemerintah membuat program untuk menanggulangnya.

DIY memberikan banyak contoh beberapa bidang program dari pemerintah untuk masyarakat, diantaranya yakni Program *Gandong Gandong*, Belabeli, Program *One Village One Product* (OVOP) dan lain sebagainya. Diantara program yang terdapat di DIY pada dasarnya memiliki tujuan dan sasaran yang tepat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Yogyakarta adalah kota yang memiliki upaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan atau *gini ratio*. Kemiskinan di Kota Yogyakarta setiap tahun mengalami penurunan akan tetapi pemerintah tidak berhenti untuk melakukan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Presentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2019**

Presentase	2016	2017	2018	2019
Penduduk Miskin	7.70 %	7.64 %	6.98 %	6.84%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyebab menurunnya angka kemiskinan di Kota Yogyakarta karena adanya pemenuhan pada akses pada bidang pendidikan dan

kesehatan untuk mengurangi beban biaya bagi masyarakat miskin, bantuan modal kepada masyarakat dengan ekonomi bawah dengan memberikan modal melalui program kelompok usaha bersama, peningkatan keterampilan dan pemberdayaan pada masyarakat, dan mensinergikan program pengentasan kemiskinan antar instansi (Kontan.co.id, 2016).

Penanggulangan kemiskinan dan menurunkan angka ketimpangan pendapatan atau *gini ratio*. Permasalahan di Kota Yogyakarta cukup kompleks sehingga membutuhkan program yang diharapkan dapat mengatasi masalah sekaligus memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Salah satu program yang di luncurkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Program Gandeng Gendong yang diluncurkan pada 10 April 2018 yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinna di Kota Yogyakarta dengan cara memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa alasan lahirnya Program Gandeng Gendong. Pertama, karena adanya semangat *Segoro Amarto* (Semangat Gotong Royong *Agawe Majune Ngayogyakarta* atau Semangat Gotong Royong Menuju Kemajuan Yogyakarta) yang diinisiasi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Gerakan Segoro Amarto diluncurkan pada 24 Desember 2010. Gerakan *Segoro Amarto* berlandaskan pada empat pilar yaitu kedisiplinan, kepedulian sosial, gotong royong, dan kemandirian. Presentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 berada pada 6,84 persen, mengalami penurunan angka kemiskinan yang melampaui target yang

diperkirakan, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 7 persen pada tahun 2022. Akan tetapi, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak akan berhenti dalam melakukan pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta dan tidak akan berhenti pada angka tersebut (Agustin, 2019).

Kedua, adanya ketimpangan pendapatan pada masyarakat. ketimpangan pendapatan diukur untuk membandingkan seberapa banyak yang dinikmati oleh 20 persen masyarakat dengan pendapatan tertinggi, 40 persen masyarakat dengan pendapatan menengah, 40 persen masyarakat dengan pendapatan rendah. Adanya ketimpangan yang terjadi sehingga secara ekonomi pendapatan dimiliki oleh 20 persen masyarakat berpendapatan tertinggi. Sehingga, Pemerintah Kota Yogyakarta membuat program agar ekonomi bisa dinikmati oleh masyarakat dengan pendapatan menengah dan pendapatan rendah.

Ketimpangan di Kota Yogyakarta disebabkan oleh faktor ketimpangan kualitas pekerjaan yaitu kurang terampil dalam suatu pekerjaan sehingga menyebabkan sulitnya masyarakat Kota Yogyakarta untuk turut andil dalam pergerakan ekonomi di Kota Yogyakarta sehingga pendapatan atau kekayaan hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki *hardskill* dan *softskill* yang lebih mumpuni.

Kebijakan Program Gandeng Gendong merupakan arah kebijakan dari walikota dan walikota terpilih. Salah satu kebijakan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan hal

tersebut maka dirumuskan satu slogan bernama Gandeng Gendong (semangat partisipatif dan gotong royong).

Program Gandeng Gendong diperkuat dengan 4 landasan hukum utama yaitu Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, Rencana Strategis BAPPEDA Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta, dan Peraturan Walikota Tentang Program Gandeng-Gendong No. 23 Tahun 2018.

Program Gandeng Gendong (menggandeng dan menggendong) Pemerintah Kota, komunitas, kampus, korporasi, dan kampung yang harus bersinergi untuk mensukseskan program sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur oleh walikota. Peran 5K yang harus mampu untuk menggandeng dan menggendong masyarakat yang berada pada 40 persen pendapatan rendah khususnya pada masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Program Gandeng Gendong mengikuti arah pembangunan Provinsi DIY tahun 2017-2022 yaitu menggunakan kebudayaan untuk mengatasi kemiskinan dan penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal (bppm.jogjaprov.go.id, 2018).

Tujuan dari Program Gandeng Gendong mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bergotong-royong membantu warga lain yang masih mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan terutama pada warga miskin agar lebih sejahtera dan meningkatkan partisipasi dari

*stakeholder*. Program Gandeng Gendong bersama, bersatu, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Dana yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar Rp. 110 miliar lebih. Tetapi pada faktanya, program pengentasan kemiskinan telah berjalan bertahun-tahun dan dana yang dialokasikan besar, namun pengentasan kemiskinan tidak dapat berjalan dengan cepat serta tentu membutuhkan waktu.

Berkaca dari hal diatas, Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan aplikasi yang bernama *Jogja Smart Service (JSS)* untuk memudahkan masyarakat Kota Yogyakarta dalam mencari informasi sekaligus sebagai solusi untuk mengangkat perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta.

Program Gandeng Gendong terdapat dua sub program yaitu Pertama, *Layanan Nglarisi* yang merupakan program untuk memberikan kesempatan kepada Usaha Kecil Mikro (UKM) Kota Yogyakarta terutama kuliner untuk menyediakan jamuan makan dan snack pada waktu makan siang dan rapat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta. OPD dapat memesan jamuan makan melalui *Layanan Nglarisi* yang terdapat pada aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)*. Kedua, *Program Dodolan Kampung* yang merupakan program perwujudan dari salah satu elemen yang terdapat pada Program Gandeng Gendong, yaitu elemen Kampung yang merupakan program untuk mengetahui potensi kuliner, wisata dan kerajinan yang terdapat di wilayah tersebut dengan mengangkat kearifan lokal yang ada. Program dilakukan di 45 Kelurahan dan 170 Kampung yang

terdapat di Kota Yogyakarta. Dengan potensi yang dimiliki oleh kampung-kampung di Kota Yogyakarta akan membantu pemerintah untuk memetakan potensi tiap kampung sehingga memberikan dampak pada masyarakat sekitar dan membawa kesejahteraan dan membantu untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Pengikut Program Gandeng Gendong pada saat ini lebih dari 80 kelompok masyarakat yang bergabung, mereka diberikan pelatihan yang dapat meningkatkan perekonomian (Agustin, 2019). Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan dana Rp. 48 miliar selama satu tahun untuk OPD pada pembelian snack (akurat.co, 2018).

Dengan adanya Program Gandeng Gendong memberikan manfaat kepada masyarakat dengan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kota Yogyakarta. Namun, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan *Layanan Nglarisi* Program Gandeng Gendong, yakni tidak semua UKM yang bergabung menerima uang hasil penjualan jamuan makan dengan OPD dengan cepat, ditambah tidak meratanya pemesanan sehingga dengan adanya koordinasi *stakeholder* dalam Program Gandeng Gendong dapat membantu mencapai tujuan dari Program Gandeng Gendong.

Forum yang dinilai mampu menurunkan ketimpangan pendapatan yaitu forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan forum *Corporate Social Responsibility* (CSR). Forum LPPM yang akan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam proses riset yang



bermanfaat untuk kepentingan usaha yang dilakukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Forum CSR yang akan membantu para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pengembangan pada produk-produk lokal dan perguruan tinggi melalui forum LPPM dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh masyarakat. Perguruan terdiri dari 53 kampus yang berada di Kota Yogyakarta dan 20 kampus yang telah memiliki perjanjian dengan pihak pemerintah Kota Yogyakarta (jogja.tribunnews.com, 2018).

Penelitian mengambil lokasi di Kota Yogyakarta terkait dengan Program Gandeng Gendong karena Kota Yogyakarta adalah kota yang pertama kali meluncurkan Program Gandeng Gendong dengan model *Segoro Amarto* yang pertama dalam mengimplementasikan Program Gandeng Gendong. Program yang selaras dengan salah satu misi Kota Yogyakarta yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dengan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta dengan memberdayakan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka batasan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Gandeng Gendong untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2019?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Implementasi Program Gandeng Gendong untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta Tahun 2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan untuk menambah wawasan atau pengetahuan dan kontribusi serta menambah pemahaman bagi yang membaca terkait dengan implementasi Program Gandeng Gendong dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

#### **Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang pelayanan publik.

## E. Studi Terdahulu

Penelitian ini menggunakan 10 *literatur riview* yang di buat oleh beberapa penulis. Hal tersebut digunakan sebagai referensi agar memudahkan penulis membandingkan penelitian yang digunakan peneliti terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis. Untuk melengkapi penelitian terdahulu dan melanjutkan penelitian tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
**Studi Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>PENELITI</b>	<b>HASIL</b>
1.	Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan	Reza Fachrudin (2015)	Hasil dari penelitian ini membahas pembuatan program untuk penanggulangan kemiskinan dengan program bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan keterampilan dan modal bantuan usaha. Banyaknya kendala yang dihadapi oleh pemerintah

			selama berjalannya program untuk penanggulangan kemiskinan.
2.	Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo	Asna Aneta (2010)	Penelitian ini membahas penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo yang dilaksanakan dalam beberapa bentuk program seperti pendidikan dan keterampilan berupa pelatihan kursus komputer, pemberian bantuan modal atau dana bergulir bagi kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat, pembangunan rumah layak huni, kegiatan pendampingan teknis. Program

			penanggulangan kemiskinan yang berjalan dengan lancar dan adanya partisipasi aktif dari masyarakat.
3.	Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Pesisir Selatan	Resy Oktaviani dan Fatmariza (2018)	Hasil dari penelitian ini, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Dampak dari adanya program PKH yang hanya dirasakan oleh beberapa masyarakat seperti ibu hamil dan balita. Banyaknya masyarakat
			yang tidak mengetahui atau memahami PKH secara menyeluruh sehingga adanya PKH

			tidak dirasakan oleh semua masyarakat.
4.	Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Pinjaman Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang)	Muhammad Sulhan dan Totok Sasongko (2017)	Hasil dari penelitian ini yakni dengan adanya pengelompokan yang dilakukan oleh petugas agar memudahkan dalam pembagaian bantuan. Program Kartu Indonesia Pintar yang ditujukan untuk pendidikan yang berdampak mencegah anak putus sekolah dan membantu memenuhi kebutuhan siswa yang kurang mampu. Kartu Pinjaman Sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk
			membantu masyarakat dengan memberikan beras raskin dan membantu

			perekonomian dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan.
5.	Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa	Puti Andiny dan Nurjannah (2018)	Penelitian ini membahas pemberdayaan UMKM yang sangat berpengaruh untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku UMKM dalam bentuk modal, mesin, grobak jualan dan bantuan lainnya sehingga dapat mengurangi pengeluaran usaha dan biaya produksi, sehingga program tersebut
			berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin.

6.	Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Sektor UMKM	Muhadin Saleh (2015)	<p>Hasil dari penelitian ini yakni pemberdayaan sektor UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, kebijakan yang menyangkut dengan pemberdayaan sektor UMKM seperti pengguliran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dengan adanya program tersebut, kendala dalam pemberdayaan sektor UMKM dapat teratasi</p>
			<p>sehingga upaya untuk penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik.</p>



7.	<p>Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung</p>	<p>Yogi Suprayogi Sugandi (2016)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini membahas Bandung merupakan salah satu kota yang menjalankan program P2KP dengan kondisi penduduk yang telah mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah, salah satu program yang diberikan pemerintah adalah bantuan kredit mikro yang diutamakan untuk membuat usaha. Banyaknya program dari pemerintah tidak berjalan dengan baik karena penduduk Kota Bandung menyalahgunakan</p>
			<p>bantuan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli kebutuhan dasar. Penduduk tidak</p>

			mendapatkan pelatihan dari pemerintah untuk menjalankan program usaha yang diberikan oleh pemerintah.
8.	Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi Tentang Program Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Pakisjati Kecamatan	Yuni Catur Wulan, Nurul Umi Ati dan Roni Pindahanto Widodo (2019)	Penelitian ini membahas program yang dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha, pelatihan usaha, peningkatan keterampilan, bimbingan motivasi dan pendampingan. KUBE memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, namun program KUBE tidak berjalan dengan lancar
	Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur)		karena kurangnya pendampingan pada masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan

			program KUBE seakan membuat masalah baru dan keterbatasan kemampuan serta keterampilan anggota yang menjadi hambatan.
9.	Analisis Dampak Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng	I Made Gunamantha dan Gede Putu Agus Jana Susila (2015)	Penelitian ini membahas Pengembangan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) yang terdiri dari kegiatan sosial pelaksanaan siklus dan pelatihan yang dijalankan dengan baik dan pemberdayaan masyarakat tergolong baik dengan cara
			pandang masyarakat yang semakin maju. Dengan pemberdayaan masyarakat telah berhasil

			mengubah tingkat kesadaran dan meningkatkan pemahaman untuk berperan dalam pembangunan dari komunitasnya.
10.	Peran Program Keaksaraan Usaha Mandiri Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di PKBM Asy Syifa Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember	Kasenawati, Niswatul Ismiyah dan Deditiani Tri Indiarti (2018)	Penelitian ini membahas program keaksaraan yang mampu meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung pada warga di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Meningkatnya kemampuan warga membuat sebagian dari
			mereka mengaplikasikannya dengan program usaha mandiri, sehingga warga

			mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui keterampilan mengelola sumber daya alam dan sekitarnya. Diharapkan dengan berkembangnya ekonomi, warga mampu meningkatkan pelayanan pendidikan yang layak agar hidup sejahtera dan dapat keluar dari masalah kemiskinan.
--	--	--	---

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terdapat pada pengkajian topik tentang pemberdayaan masyarakat, seperti penelitian dari Reza Fachrudin, Asna Aneta, Puty Andiny dkk, Muhadin Saleh, Sugi Suprayogi, I Made Gunamantha, Kasenawati dkk, dan Yuni Catur Wulan dkk, tentang pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan keterampilan dan pendampingan pelatihan usaha untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelatihan kelompok usaha bagi masyarakat. Sehingga dengan adanya bantuan untuk pelatihan dan

pendampingan bagi masyarakat akan membantu pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan.

Perbedaan pada pelatihan tersebut terdapat pada penelitian, Resy Oktaviani dkk dan Muhammad Suhan dkk tentang program bantuan kepada masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan bantuan seperti pelayanan kesehatan yang memadai, bantuan pendidikan dan bantuan perekonomian dengan memberikan bantuan beras raskin. Dengan memberikan kartu pinjaman sosial dan kartu indonesia pintar yang akan membantu masyarakat.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **■ Teori Kebijakan Publik**

#### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan atau dalam bahasa inggris yang sering kita dengar istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dari dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dsb) untuk mencapai cita-cita, tujuan dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha untuk mencapai sasaran. Kebijakan publik membahas mengenai soal bagaimana persoalan publik disusun dan didefinisikan serta bagaimana semuanya diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Menurut Robert Eyeston (Leo Agustino, 2008: 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan anatar unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Menurut Woll (Tagkisan, 2003: 2) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

#### **b. Tahap-tahap Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik merupakan aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis terdapat pada serangkaian yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Tahap-tahap kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik meletakkan minat untuk mengkaji kebijakan publik kedalam beberapa tahapan. Tujuan pembagian tahapan ini agar memudahkan seseorang dalam mengkaji kebijakan publik. Namun, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap kebijakan publik dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan menurut Holwet dan M. Ramesh

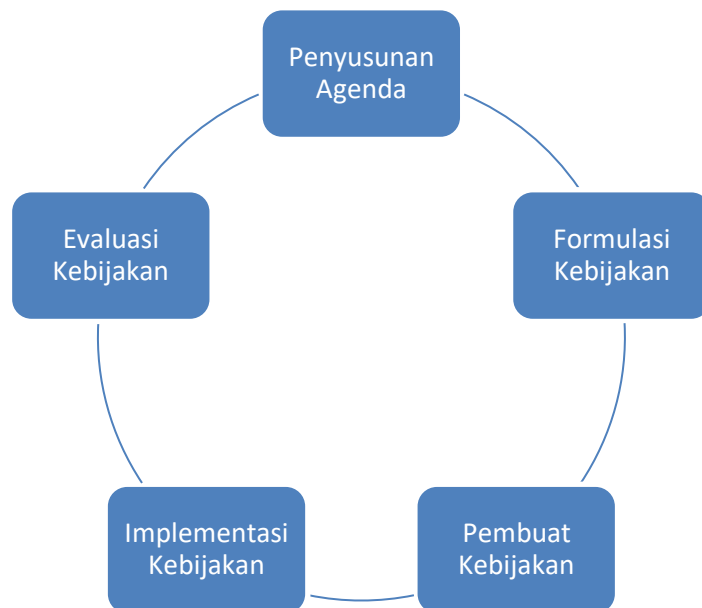
(Subarsono, 2005: 13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Agenda, yaitu proses agar suatu masalah mendapatkan perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi Kebijakan, yaitu proses perumusan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuat Kebijakan, yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi Kebijakan, yaitu proses melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil atau tujuan yang ingin dicapai.
5. Evaluasi Kebijakan, yaitu proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil dari kebijakan. Secara singkat tahap-tahap kebijakan adalah seperti dibawah ini:

### **Gambar 1.1**

#### **Tahap-Tahap Kebijakan**





Sumber : Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005: 13)

### c. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Subarsono (2010: 22-24) ciri-ciri khusus kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan.

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

1. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah untuk mencapai tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan, kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin juga berbentuk negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

## ■ Teori Implementasi Kebijakan

### a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan putusan kebijakn yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang akan diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam keputusan kebijakan tersebut proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dan terbentuknya program pelaksanaan.

Menurut Van Meter dan Horn (Winarno, 2005) implementasi sebagai *“those action by public or private individuals (or groups) that are diracted at the activement of objectives set forthe in prior decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Menurut Lineberry (Putra, 2003:81) implementasi adalah tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta secara individu dan kelompok yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Menurut Gindle dalam Agustino (2008: 192), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu:

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Isi kebijakan merupakan seberapa jauh kepentingan sasaran kelompok yang terdapat dalam isi kebijakan tersebut, perubahan yang diinginkan, apakah letak dari program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan program didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

b. Lingkungan Implementasi (*Contexts of Policy*)

Lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa.

**b. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Menurut George C. Edwards III (1980) variabel atau faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah 1) Komunikasi (*Communications*), 2) Sumber Daya (*Resources*), 3) Sikap

(*Dispositions/Attitudes*), dan 4) Struktur Birokrasi (*Burecratic Structure*). Secara terperinci Edwards III (1980) menjelaskan keempat faktor tersebut sebagai berikut:

1) Komunikasi (*Communications*)

Supaya implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif maka penanggungjawab implementasi kebijakan harus mengetahui ukuran dan tujuan yang akan dicapai. Implementasi kebijakan harus diterima oleh semua anggota dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor dan para implementor tidak memahami apa yang mereka lakukan dan tidak ada kejelasan dan tidak cukupnya komunikasi secara serius maka sangat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Mengimplementasikan kebijakan agar efektif maka dibutuhkan sumber daya yang cukup. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan sumber daya yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- i. Jumlah staff yang mencukupi dan memiliki *skill* yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas.

- ii. Informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan mengenai sumber yang terkait dalam pelaksanaan program. Informasi memiliki dua bentuk, yaitu: 1) Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, dan implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan, dan 2) Mengetahui data pendukung terhadap peraturan-peraturan pemerintah.
- iii. Adanya kewenangan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan dalam program dan dapat diarahkan sesuai dengan harapan. Kewenangan juga untuk mengatur atau membelanjakan keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.
- iv. Adanya fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan program seperti dana dana sarana prasarana.

### 3) Sikap (*Dispositions/Attitudes*)

Faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor, jika implementor setuju dengan bagian isi dari kebijakan maka mereka akan

melaksanakan dengan senang hati dan mengalami keberhasilan dalam implementasi kebijakan tetapi jika pandangan para implementor berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak kendala dan masalah yang akan di hadapi.

Sikap para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran dari program namun mereka sering mengalami kegagalan dalam pelaksanaan program karena adanya penolakan tujuan yang terdapat di dalam program tersebut dan sebaiknya harus memuat dukungan dari pemimpin untuk mencapai tujuan dari program.

Wujud dari dukungan pemimpin adalah menempatkan kebijakan sebagai prioritas utama program, penempatan pelaksana orang atau kelompok pendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, suku, jenis kelamin dan karakteristik dari demografi.

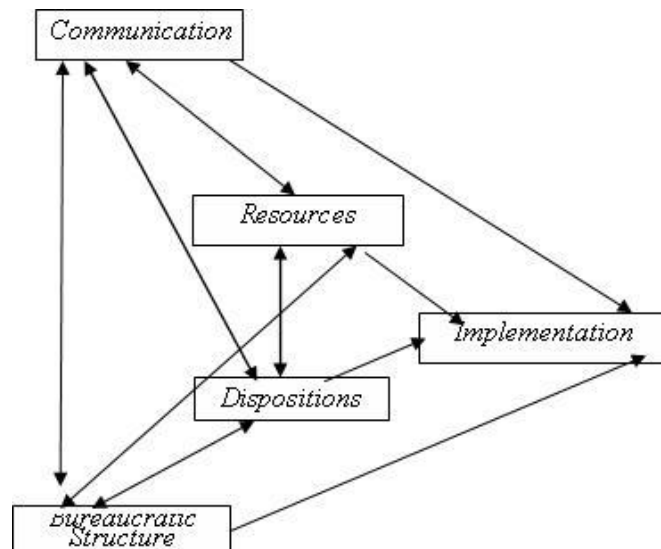
#### 4) Struktur Birokrasi (*Burecratic Structure*)

Mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan perlu ada *Standar Operating Procedur* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, jika pelaksana program melibatkan dari satu institusi.

Fragmentasi merupakan tekanan dari luar seperti komisi legislatif, pejabat, kelompok kepentingan, konstitusi negara, dan lain-lain. Edwards III menjelaskan fragmentasi adalah penyebaran tanggungjawab terhadap suatu wilayah kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Fragmentasi merupakan definisi dari tanggung jawab semakin banyak unit-unit yang terlibat maka semakin kecil keberhasilan yang ingin dicapai.

Model yang dikembangkan oleh Edward III tersebut tampak pada gambar berikut ini:

**Gambar 1.2**  
**Model Implementasi Edward III**



Sumber : George III Edward: Implementing public policy, 1980

**c. Model-model Implemetasi Kebijakan**

Menurut Charles O. Jones (1991:296) terdapat tiga pilar kegiatan tersebut adalah:

1. Organisasi

Struktur organisasi yang jelas, pembentukan atau penataan sumber daya, dan unit serta metode diperlukan dalam pengoperasian program.

2. Interpretasi

Menafsirkan agar program menjadi rencana dan arah yang tepat dan dapat dilaksanakan. Para pelaksana dapat menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan agar tujuan tercapai.

3. Penerapan atau aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas sesuai dengan tujuan dan perlengkapan program.

#### **d. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan**

Proses implementasi kebijakan mencakup beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan, terdapat tahapan kegiatan sosialisasi agar seluruh masyarakat dapat mengetahui apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan. Kebijakan perlu disosialisasikan agar banyak masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dapat menerima, mendukung dan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Tahap Pengorganisasian (*to organize*)



Tahap pengorganisasian yang mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan yang akan menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (besarnya anggaran yang akan diperlukan, dari mana sumbernya, dan dapat mempertanggungjawabkan anggaran tersebut), penetapan sarana dan prasarana (apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan), penetapan tata kerja, dan penetapan pola kepemimpinan dan adanya koordinasi pelaksanaan kebijakan.

## ■ Teori Kemiskinan

### a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat yang berada di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan yang dapat ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan yang rendah yang dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar kehidupan di suatu daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak

seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, air bersih, pendidikan, perumahan, sumber daya alam, pertanahan, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Kemiskinan dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga dapat memperbesar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar atas keberlangsungan hidup manusia. Jika kemiskinan tidak ditangani dengan cepat maka akan menimbulkan banyak permasalahan baru seperti kriminalitas, buruknya kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan secara sungguh-sungguh agar suatu negara tidak mengalami keterbelakangan (Istan, 2017).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia

yang bermartabat dengan keterbatasan dalam mengakses segala sektor dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan harus diselesaikan agar suatu negara tidak mengalami keterbelakangan.

#### **b. Bentuk Kemiskinan**

Menurut (Suryawati: 2004) kemiskinan memiliki empat bentuk, yaitu:

##### **1. Kemiskinan Absolut**

Kemiskinan absolut merupakan kondisi dimana pendapatan seseorang atau kelompok orang berbeda di bawah garis kemiskinan sehingga mengalami kekurangan untuk mencukupi kebutuhan standar.

##### **2. Kemiskinan Relatif**

Kemiskinan relatif merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi akibat adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan.

##### **3. Kemiskinan Kultural**

Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi akibat adanya sikap atau kebiasaan seseorang atau masyarakat yang berasal dari budaya yang tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara yang modern.

#### 4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses sumber daya yang biasanya terjadi pada suatu tatanan sosial politik yang kurang mendukung adanya pembahasan kemiskinan.

#### c. Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro, penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut:

1. Kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan, sedangkan penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dengan jumlah terbatas dengan kualitas yang rendah.
2. Munculnya kemiskinan akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga menyebabkan produktivitas menjadi rendah dan upah yang rendah.

### G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah istilah untuk menggambarkan suatu keadaan yang akan diteliti serta di dalamnya terdapat keadaan suatu

kelompok ataupun individu yang akan menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Berikut ini adalah definisi konseptual dalam penelitian Implementasi Program Gandeng Gendong dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2018:

1. Kebijakan Publik adalah hubungan antar pemerintah dengan lingkungannya dan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2. Implementasi adalah tindakan atau proses yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan dan memberikan dampak bagi masyarakat.
3. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia yang bermartabat.
4. Program Gandeng Gendong adalah program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta melalui pemberdayaan masyarakat dan pelatihan potensi lokal.

#### **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional menurut (Azwar, 2013) adalah suatu definisi yang berisi tentang variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga dapat mempermudah hak yang akan diteliti. Berikut ini merupakan definisi operasional dalam penelitian Implementasi Program

Gandeng Gendong dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2019, yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Definisi Operasioal**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
Implementasi Program Gandeg Gendong menurut Grindle dalam Agustino (2008:192)	1. Isi Kebijakan <i>(Content of Policy)</i>	- Perubahan setelah adanya Program Gandeng Gendong - Manfaat yang diterima target group
	2. Lingkungan Implementasi <i>(Conteks of Policy)</i>	- Strategi pelaksanaan Program Gandeng Gendong
Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III (1980)	1. Komunikasi <i>(Communications)</i>	- Sosialisasi tentang Program Gandeng Gendong - Koordinasi antar <i>stakeholder</i> Program Gandeng Gendong
	2. Sumber Daya <i>(Resources)</i>	- Kejelasan terkait SDM Program Gandeng Gendong

		- Kejelasan terkait dengan fasilitas pendukung
	3. Sikap <i>(Dispositions/Attitudes)</i>	- Kejelasan terkait dukungan untuk Program Gandeng Gendong  - Hambatan dalam pelaksanaan Program
	4. Struktur Birokrasi <i>(Burecratic Structure)</i>	- <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) pada pelaksanaan Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta.  - Fragmentasi

## I. Metode Penelitian

### ■ Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Program Gandeng Gendong dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2019 ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam terkait dengan proses *Implementasi* Program Gandeng Gendong Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2019.

## ■ Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data langsung yang menyangkut pendapat dari responden tentang variabel penelitian yang bisa diperoleh dari jawaban hasil *interview* dan wawancara.

**Tabel 1.3**  
**Data Primer**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Mengumpulkan informasi mengenai Program Gandeng Gendong	BAPPEDA Kota Yogyakarta Sub. Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah	Wawancara
Peranan DPMPPA dalam Program Gandeng Gendong (Program Dodolan Kampung)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA)	Wawancara
Peranan forum TSLP dalam Program Gandeng Gendong sebagai <i>stakeholder</i>	Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)	Wawancara



Peranan forum LPPM dalam Program Gandeng Gendong sebagai <i>stakeholder</i>	Forum Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPPM)	Wawancara
Peranan Ikatan Arsitek Indonesia dalam Program Gandeng Gendong sebagai <i>stakeholder</i>	Ikatan Arsitek Indonesia DIY	Wawancara
Data pengikut layanan <i>Nglarisi</i>	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta	Wawancara
Mengumpulkan informasi mengenai potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta	Perwakilan petugas Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta	Wawancara
Mengumpulkan informasi	Masyarakat bergabung	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber seperti arsip-arsip, buku-buku, atau dokumen-dokumen yang telah ada dan yang berhubungan dengan variabel penelitian.

**Tabel 1.4**  
**Data Sekunder**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Data kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dokumentasi
Panduan untuk mengetahui implementasi suatu program	Buku	Dokumentasi
Informasi mengenai deskripsi Program Gandeng Gendong	Internet	Dokumentasi
Menambah informasi tentang implementasi program	Jurnal	Dokumentasi

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian tentang Program Gandeng Gendong akan dilaksanakan di Kantor Wali Kota Yogyakarta Jl. Kenari No.56, Muja

Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Unit Analisis

Unit analisis pada penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Perlindungan Anak (DPMPPA), Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP), Forum Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPPM), Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta, Ikatan Arsitek Indonesia DIY, dan Masyarakat anggota Program Gandeng-Gendong.

**Tabel 1.6**  
**Unit Analisis**

<b>Stakeholder Program Gandeng Gendong</b>	<b>Jumlah Responden</b>
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta	1
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta	1
Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)	1
Ketua Forum Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPPM)	1

Ikatan Arsitek Indonesia DIY	1
Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta	1
Petugas Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta	1
Masyarakat pengikut Program Gandeng Gendong	4
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>

## ■ Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu kebutuhan mutlak untuk melengkapi sejumlah informasi dan data secara akurat. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan spesifik terkait dengan informasi yang akan digali mengenai Program Gandeng Gendong. Narasumber yang akan diwawacarai adalah kepada Sub Bidang ekonomi dan Keuangan Daerah BAPPEDA Kota Yogyakarta yaitu Agustin Wijanyati, S.Si., M.Ec.Dev. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta yaitu Retnaningtyas, SSTP. Kepala Sub Bagian Sistem dan Prosedur Tatik Wahyuningsih, SSTP., M.Ec.Dev. Kasubid Ekonomi dan Keuangan. Kepala Sub Bidang Penelitian Sulisty Handoko, SE. Ketua Bidang Pengabdian Gatot Suprihadi.

## **b. Dokumentasi**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun data baik dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi serta obyek lain yang terkait dengan Implementasi Program Gandeng Gendong. Dokumen yang dihimpun antara lain data-data kemiskinan di Kota Yogyakarta.

## **■ Teknik Analisis Data**

Menurut Sutopo (2003: 8), analisis data merupakan model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data dan berlangsung setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Ketika wawancara sedang berlangsung dan peneliti merasa jawaban dari narasumber terkait masih belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan.

### **a. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reaksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, dan menelusur tema).

## **b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun serta memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan bagan.

## **c. Penarikan Kesimpulan**

Tahap terakhir yang berisikan proses pengambilan keputusan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkapkan “Apa” dan “Bagaimana” dari temuan penelitian tersebut.